



## OPTIMALISASI PARTISIPASI PEMILIH PEMULA PADA PEMILU 2024 DI DESA POMBWE KECAMATAN SIGI BIROMARU KABUPATEN SIGI

Syahrudin Hattab<sup>1</sup>, Daswati<sup>2</sup>, Rachmad<sup>3</sup>  
<sup>1,2,3</sup>Universitas Tadulako

### Article Information

#### Article history:

Received Oktober 01,  
2023

Approved Oktober 06  
2023

#### Keywords:

Optimalisasi,  
Pemilih Pemula 2024

### ABSTRAK

Pelaksanaan kegiatan pengabdian dilaksanakan di Desa Pombewe Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada bulan Juli 2023. Jumlah Peserta sebanyak 28 orang. Pengabdian ini difokuskan pada Pemilih Pemula memiliki peran penting dalam proses pemilihan umum (Pemilu). Hasil sosialisasi dan Pengabdian ini bertujuan untuk mampu memberikan rangsangan kepada pemilih pemula untuk terlibat aktif dalam pesta demokrasi lima tahunan (Pemilu) dan pemilih pemula dapat memiliki kesiapan yang maksimal dalam menentukan pilihan serta mengetahui pentingnya pemilu dalam perjalanan demokrasi bangsa ini. Dan kedua dapat menentukan pilihan sesuai hati nurani dan dapat melihat Track record calon.

### ABSTRACT

The service activities were carried out in Pombewe Village, Sigi Biromaru District, Sigi Regency. This Community Service Activity was carried out in July 2023. The number of participants was 28 people. This service is focused on Beginner Voters having an important role in the general election process (Election). The results of this outreach and service aim to be able to provide stimulation to first-time voters to be actively involved in the five-yearly democratic party (Election) and first-time voters can have maximum readiness in making choices and knowing the importance of elections in the course of this nation's democracy. And secondly, you can make choices according to your conscience and you can see the candidate's track record...

## PENDAHULUAN

Partisipasi dalam pemilu merupakan salah satu aspek penting dari demokrasi. Asumsi yang mendasari demokrasi (partisipasi) merupakan orang yang paling tahu tentang apa yang baik bagi dirinya. Pemilih pemula dalam katagori politik adalah kelompok pemula yang baru pertamakali menggunakan hak pilihannya, orientasi pemilih pemula ini selalu dinamis dan akan berubah mengikuti kondisi yang dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, pendidikan politik dan demokrasi kepada segenap masyarakat khususnya pemuda (pemilih pemula) harus segera dilakukan untuk menekan serendah mungkin ketidak terlibatan pemilih dalam pemilu. (Pardede, 2014 Volume 3 No 1

Pemuda Desa Pombewe Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi adalah salah satu bagian dari pemuda harapan bangsa yang diharapkan dapat memiliki perubahan dan dapat lebih maju untuk menuju kearah yang lebih baik serta meraih sukses. Pengetahuan dan pemahaman pemuda khususnya pemilih pemula di desa pombewe masih sangat minim dan terbatas dengan kata lain kurang memiliki pengetahuan tentang Pemilihan Umum, (PEMILU). sehingga diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan Pemuda Tentang pemilu dan dapat memperbaiki kondisi politik saat ini serta dapat mengatasi apatisme masyarakat khususnya pemuda. Dalam kegiatan ini pula akan dilakukan pemberian Pengetahuan tetang Pemilu, demokrasi dan Politik kepada pemuda Desa Pombewe.

## LANDASAN TEORI

Partisipasi politik merupakan keterlibatan individu sampai pada bermacam-macam tingkatan di dalam sistem politik. Michael Rush dan Philip Althoff berpendapat, partisipasi politik dianggap sebagai akibat dari sosialisasi politik. Namun kiranya perlu juga dicatat bahwa partisipasi politik pun berpengaruh terhadap sosialisasi politik. tanpa partisipasi politik, sosialisasi politik tak dapat berjalan.

Selain definisi tersebut, partisipasi politik pun dapat dijelaskan sebagai usaha terorganisir oleh para warga negara untuk memilih pemimpin-pemimpin mereka dan mempengaruhi bentuk dan jalannya kebijaksanaan umum. Usaha ini dilakukan berdasarkan kesadaran akan tanggung jawab mereka terhadap kehidupan bersama sebagai suatu bangsa dalam suatu negara. Dalam hal ini, partisipasi politik berbeda dengan mobilisasi politik, yaitu usaha pengerahan massa oleh golongan elite politik untuk mendukung kepentingan-kepentingannya. Mobilisasi politik tampak antara lain dalam upaya pengerahan sejumlah besar orang oleh golongan elite tertentu untuk mendengarkan pidato-pidato politik dalam suatu rapat umum, atau dalam upaya menggerakkan sejumlah besar orang untuk mengacaukan suatu kedutaan asing

Partisipasi politik berbeda-beda dari masyarakat yang satu ke masyarakat yang lain. Kadar partisipasi politik pun bervariasi. Konsep partisipasi politik mencakup apa yang disebut apatisme politik, alienasi politik, dan kekerasan politik. Dalam suatu masyarakat terdapat orang-orang atau kelompok-kelompok yang bersikap apatis terhadap urusan-urusan politik dan orang-orang yang teralienasi, terasing dari kehidupan politik. selain itu terdapat juga orang-orang yang melakukan kekerasan politik. Perlu juga dicatat bahwa

partisipasi politik pun menumbuhkan motivasi orang untuk meningkatkan partisipasinya. Termasuk di sini, motivasi untuk menduduki jabatan puncak dalam bidang politik.

Dalam kehidupan politik masyarakat, tidak sedikit warga yang tidak ingin berpartisipasi atau tidak ingin terlibat dalam aktivitas politik, bisa dikatakan tidak menaruh perhatian sama sekali terhadap proses perpolitikan. Ada beberapa alasan mengapa hal tersebut terjadi. Menurut Morris Rosenberg disebabkan karena yang pertama yaitu, aktivitas politik merupakan ancaman terhadap berbagai aspek kehidupannya. Anggapan bahwa aktivitas politik merupakan ancaman bagi kehidupan warga tersebut mengakibatkan masyarakat tidak ingin terlibat karena adanya resiko yang mengancam kehidupannya. Menurut mereka tidak berpartisipasi merupakan pilihan terbaik. Kedua, aktivitas politik dianggap sebagai sesuatu yang akan sia-sia. Anggapan masyarakat terhadap partisipasi politik merupakan hal yang akan sia-sia sangat berpengaruh terhadap keikutsertaan seseorang dalam aktivitas politik. Hal ini dikarenakan ikut berpartisipasi dalam perpolitikan tidak akan memberikan manfaat bagi mereka sehingga muncul anggapan ikut berpartisipasi politik hanya menjadi tindakan yang sia-sia. Ketiga, ketiadaan faktor untuk “memacu diri untuk bertindak” atau disebut juga sebagai “perangsangan politik”. Tidak adanya dorongan untuk ikut berpartisipasi dalam aktivitas politik, hal ini terjadi karena tidak adanya kebutuhan material atau immaterial yang akan di dapatkan apabila ikut berpartisipasi sehingga tidak ada dorongan untuk berpartisipasi.

Pemikiran Morris Rosenberg, dapat kita pahami mengapa seseorang ingin berpartisipasi dalam aktivitas politik. Alasan yang pertama yaitu tidak ada ancaman bagi dirinya apabila turut berpartisipasi, seperti ancaman kematian, tertutupnya peluang usaha untuk keterusan hidupnya. Sehingga ia ingin berpartisipasi dalam aktivitas politik. Kedua, ada manfaat yang didapatkan dari aktivitas politik. Hal ini berlaku relative karena manfaat yang di dapatkan setiap orang berbeda-beda. Misalnya bagi seorang pengangguran yang mencalonkan diri sebagai anggota legislative akan mendapatkan pekerjaan selama lima tahun apabila dia terpilih. Jadi dapat dipahami manfaat yang didapatkan dipahami melalui motif dari tindakan seseorang. Ketiga, aktivitas politik memenuhi kebutuhan secara material dan immaterial bagi kehidupan seseorang. Dengan mempertimbangkan untung dan rugi dalam melakukan aktivitas politik seseorang mau melakukan aktivitas politik. Misalnya bagi calon mendapatkan perhatian, dukungan, dan dorongan. Sementara untuk pemilih mendapatkan uang, beras dan lain-lain yang bersifat material. Apa yang dikemukakan oleh Robert Lane dalam studinya mengenai keterlibatan politik, mempersoalkan bahwa partisipasi politik memenuhi empat macam fungsi. Pertama, sebagai sarana untuk mengejar kebutuhan ekonomis; kedua, sebagai sarana untuk memuaskan kebutuhan bagi penyesuaian social; ketiga, sebagai sarana untuk mengejar nilai-nilai khusus; dan keempat, sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan bawah sadar dan kebutuhan psikologis tertentu.

#### Bentuk-Bentuk Partisipasi Politik

Ada sedikit kesulitan dalam penyajian berbagai bentuk partisipasi politik, terlepas dalam penyajian berbagai bentuk partisipasi politik, terlepas dari tipe sistem politik yang bersangkutan, yaitu: segera muncul dalam ingatan peranan para politisi profesional, para pemberi suara, aktivis-aktivis partai, dan para demonstran. Betapapun juga, penting untuk menempatkan posisi sebenarnya dari aktivis politik, dan melihat apakah terdapat semacam hubungan hirarkis antara peristiwa-peristiwa tadi. Barangkali saja, hirarki yang paling sederhana dan paling berarti ialah hirarki yang didasarkan atas taraf atau luasnya partisipasi.<sup>12</sup> Bentuk partisipasi politik seseorang tampak dalam aktivitas-aktivitas politiknya. Bentuk partisipasi politik paling umum dikenal adalah pemungutan suara

(voting) baik untuk memilih para calon wakil rakyat, atau memilih kepala negara. Dalam buku Pengantar Sosiologi Politik,

Di negara berkembang seperti Indonesia kegiatan partisipasi politik masih dianggap sebatas menggunakan hak suara dalam pemilihan umum untuk mendukung calon atau kandidat dalam pemilihan umum. Anggapan ini bersifat umum di masyarakat, apabila diakutkan dengan pengertian partisipasi menurut para ahli politik tentunya ini merupakan hal yang sangat keliru, karena kegiatan partisipasi politik adalah ikut serta dalam pemilihan umum mulai dari memberikan hak suara, mengikuti kampanye baik legal atau illegal, terpaksa atau kehendak sendiri. Orang yang akan dipilih dalam pemilihan umum dan orang yang tergabung dalam salah satu partai juga telah berpartisipasi dalam politik. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah pemikiran para ahli mengenai partisipasi politik;

### **METODE PELAKSANAAN**

Metode yang digunakan oleh tim pengabdian mencakup dua metode sekaligus sebagai berikut (Mardikanto dan Soebiato, 2013). Pertama, metode ceramah, dalam hal ini tim pengabdian menyampaikan materi kepada masyarakat sasaran mengenai topik pengabdian. Ceramah disampaikan oleh ketua Pengabdian selanjutnya, metode diiskusikan dan sharing antara masyarakat sasaran dengan tim pengabdian. Adapun evaluasi yang digunakan oleh tim pengabdian adalah model CIPP (*Context, Input, Process, and Product*) yang digagas oleh Tayipnafis (2008) sebagaimana dikutip oleh Mardikanto dan Soebiato (2013). Penjelasan dari metode evaluasi ini adalah sebagai berikut: a. Evaluasi Contexts, berkaitan dengan beberapa faktor dan kondisi sebelum dilaksanakan pengabdian kepada masyarakat, yakni tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan; b. Evaluasi Input, adalah evaluasi terkait dengan masukan yang diberikan tim pengabdian kepada masyarakat sasaran; c. Evaluasi Process, yakni terkait dengan pelaksanaan program pengabdian dari awal sampai akhir; d. Evaluasi Product, yakni terkait dengan kualitas hasil kegiatan yang dicapai berdasarkan feedback dari masyarakat

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pengabdian ini dilakukan di Desa Pombewe kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi, Kegiatan Pengabdian Ini Dilakukan Dengan cara sosialisasi kepada peserta dengan memberikan pemahaman tentang demokrasi dan pendidikan politik guna untuk mengoptimalkan partisipasi pemilih pemula pada Pemilihan Umum (PEMILU) 2024. Mendatang, pengabdian kepada masyarakat ini dimulai dari perencanaan oleh Tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako Sulawesi Tengah yang terdiri dari 3 (Tiga) orang dosen dan 1 (Satu) Mahasiswa)

Untuk mengoptimalkan peran pemilih pemula dalam pemilihan umum tahun 2024 mendatang maka perlu diberikan pendidikan politik dan edukasi kepada calon pemilih khususnya pemilih pemula di Desa Pombewe. Peserta yang hadir berjumlah 28 orang.

#### **Pembahasan**

Demokrasi sebagai suatu sistem telah dijadikan alternatif dalam berbagai tatanan aktivitas bermasyarakat dan bernegara di beberapa Negara. Seperti diakui oleh Moh. Mahfud MD, ada dua alasan dipilihnya demokrasi sebagai sistem bermasyarakat dan bernegara. Pertama, hampir semua negara di dunia ini telah menjadikan demokrasi sebagai asas yang fundamental.; Kedua, demokrasi sebagai asas kenegaraan secara esensial telah memberikan arah bagi peranan masyarakat untuk menyelenggarakan

Negara sebagai organisasi tertingginya. Oleh karena itu, diperlukan pengetahuan dan pemahaman yang benar pada warga masyarakat tentang demokrasi

Pemilu adalah tatacara untuk mewujudkan demokrasi, dengan cara perwakilan. Masih ingatkan bahwa demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat. Bahkan sering dikatakan bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dewasa ini, demokrasi dipercaya oleh banyak orang sebagai sistem politik yang paling mampu mewujudkan kedaulatan rakyat. Pemilu memiliki arti penting sebagai salah satu prosedur utama dalam demokrasi. Dalam sistem demokrasi modern, kedaulatan rakyat hanya bisa dikelola secara optimal melalui lembaga perwakilan. Oleh karena itu, arti penting pemilu yang utama adalah sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Dalam pemilu, rakyat memilih wakil-wakilnya yang diharapkan dapat memperjuangkan aspirasi dan kepentingan mereka.

Desain Sistem Pemilu di Indonesia telah diatur dalam UUD 1945, UU Pemilu dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), Peraturan Bawaslu (Perbawaslu), dan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (Peraturan DKPP). Unsur atau dimensi Sistem Pemilu di Indonesia dapat dilihat berdasarkan jenis pemilihannya, yaitu: 1. Pemilu untuk Memilih Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Pemilu Tahun 2019 dan 2024 diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Pemilu dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka.

Asas Pemilu dalam Pemilu ataupun Pemilihan terdapat enam asas yang harus dijunjung, keenam asas tersebut ialah: 1. Langsung Asas langsung berarti masyarakat sebagai pemilih memiliki hak untuk memilih secara langsung dalam Pemilu/Pemilihan sesuai keinginan sendiri tanpa perantara/diwakilkan. 2. Umum Pemilu/Pemilihan berlaku untuk semua Warga Negara yang memenuhi syarat. Tidak membedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, golongan, pekerjaan, dll. 3. Bebas Seluruh Warga Negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih pada Pemilu/Pemilihan bebas menentukan siapa saja yang akan dipilih untuk membawa aspirasinya tanpa tekanan. 4. Rahasia Dalam menentukan pilihannya, pemilih dijamin kerahasiaan atas pilihannya. Pemilih memberikan suara pada surat suara tanpa diketahui oleh orang lain atau siapapun. 5. Jujur Semua pihak yang terkait dengan Pemilu/Pemilihan harus bertindak dan bersikap jujur sesuai peraturan yang berlaku. 6. Adil Dalam pelaksanaan pemilu/pemilihan, baik pemilih maupun peserta pemilu/pemilihan mendapatkan perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun. Keenam asas tersebut kemudian disingkat menjadi L-U-BE-RJUR-DIL.

Hak pilih atau bisa disebut dengan pemilih, merupakan hak warga Indonesia yang diatur oleh UU No. 17 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Dalam pasal 4 ayat 1 Peraturan KPU No. 11 Tahun 2018 menyebutkan:

Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:

- a. genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, sudah kawin, atau sudah pernah kawin;
- b. tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
- c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- d. berdomisili di wilayah administratif Pemilih yang dibuktikan dengan KTP-el;
- e. dalam hal Pemilih belum mempunyai KTP-el sebagaimana dimaksud dalam huruf d, dapat menggunakan Surat Keterangan yang diterbitkan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat; dan

- f. tidak sedang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

### **KESIMPULAN**

Dari hasil Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat tentang pentingnya pengetahuan pemilih pemula dalam rangka partisipasi pada pemilu 2024 mendatang sehingga mengurangi masyarakat yang Golput/tidak. kegiatan ini memang sangatlah menarik dalam hal yang lainnya. Mulai dari awal pelaksanaan yakni observasi penetapan Desa Pombewe sebagai lokasi pengabdian.

pada pelaksanaan kegiatan penyampaian materi tentang pentingnya pengetahuan pemilih pemula dalam Pemilu 2024,, dapat disimpulkan bahwa kegiatan pengabdian sangat bermanfaat bagi masyarakat khususnya pemilih pemula/pemuda Desa, yang menjadi target sasaran Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah pemuda. peserta sangat antusias mengikuti kegiatan penyampaian materi melalui ceramah, tanya jawab dan diskusi.

### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako Sulawesi Tengah mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat., terkhusus kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Tadulako Sulawesi Tengah. Tim Pengabdian juga mengucapkan terima kasih kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan perangkat Desa Pombewe Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi, atas bantuan dan fasilitas yang diberikan kepada Tim sehingga Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini berjalan dengan baik dan selesai sesuai dengan waktu yang ditetapkan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- [1] Rafael Raga Maram, Pengantar Sosiologi Politik Suatu Pemikiran dan Penerapan, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007).
- [2] Michael Rush dan Phillip Althoff; alih bahasa Kartono Kartini, Pengantar Sosiologi Politik, (Jakarta: Rajawali Pers,2008).
- [3] Michael Rush dan Phillip Althoff; alih bahasa Kartono Kartini, Pengantar Sosiologi Politik.
- [4] Asshiddiqie, Jimly, 2013, Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu, Raja grafindo, Jakarta
- [5] Undang-Undang No. 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- [6] Peraturan KPU No. 11 Tahun 2018